



Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW oleh India dalam Menangani Kasus *Dowry Death*

Lisa Cahyanida Siswanto

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip.undip.ac.id

ABSTRACT

India is one of 189 countries that ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), a convention that protects women's rights. However, the practice of dowry that harms women continues to this day. This practice requires the bride to grant a number of dowry to the groom. Dowry's request that was not fulfilled prompted the groom's family to commit acts of violence that could result in bride's death. This phenomenon has known as dowry death. Hence, this research seeks to prove the reason for the existence of dowry deaths even though India has already ratified CEDAW. This research is a qualitative research that explained through the concept of noncompliance. This research found that the practice of dowry continued to occur due to the lack of optimal implementation of CEDAW by India's government, NGOs and local communities.

Keywords: CEDAW, bride, groom, dowry, dowry death, noncompliance

PENDAHULUAN

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) merupakan konvensi internasional yang ditetapkan oleh PBB yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dengan meyakinkan sebanyak mungkin negara dalam menerima prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di segala bidang (UN Women, 2014). India telah meratifikasi CEDAW pada 9 Juli 1993 (UNTC, 2019). Meskipun demikian, India menempati urutan pertama sebagai negara yang paling berbahaya bagi perempuan karena praktik kebudayaannya (Reuters, 2018). Praktik budaya tradisional India yang dinilai mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu sistem *dowry* atau mahar. Pihak pengantin perempuan dalam tradisi pernikahan di India menyerahkan sejumlah *dowry* kepada pihak pengantin laki-laki. Permintaan *dowry* yang tidak kunjung terpenuhi mendorong terjadinya kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak pengantin laki-laki terhadap pengantin perempuan yang bahkan menyebabkan kematian atau disebut dengan *dowry death* (Resen & Ranteallo, 2012). Kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu permasalahan utama yang belum dapat diselesaikan oleh India. Kasus tewasnya perempuan akibat *dowry* dalam rentang waktu 1995 hingga 2015 telah mencapai 40-50% dari total kasus pembunuhan yang menimpa perempuan di India setiap tahunnya (National Crime Record Bureau, 2011).

Praktik *dowry* di India tersebut secara jelas mencederai prinsip-prinsip CEDAW. CEDAW melalui pasal 2 menyebutkan bahwa negara peserta harus mengupayakan dalam

membuat dan menerapkan peraturan perundangan terkait dengan penghapusan tindakan-tindakan yang dianggap menimbulkan perlakuan diskriminasi sebagai upaya dalam melindungi hak asasi perempuan. Pasal 5a yang terdapat di dalam CEDAW kemudian memperjelas bahwa negara peserta perlu untuk mengubah pola perilaku sosial dan budaya yang bersifat diskriminasi pada salah satu gender. CEDAW melalui pasal 16 juga mewajibkan negara peserta untuk melakukan segala upaya agar perlakuan diskriminasi terhadap perempuan dalam pernikahan dan keluarga dapat segera terhapuskan. *General Recommendation No. 19: Violence against Women* tahun 1992 juga menegaskan bahwa praktik *dowry* merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan tetap terjadinya kasus *dowry death* di India meskipun telah meratifikasi CEDAW melalui konsep *noncompliance* (CEDAW, 1992).

Negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional memiliki kewajiban untuk patuh terhadap aturan-aturan yang berada di dalamnya. Negara peserta yang memiliki kepentingan selaras dengan isi perjanjian, maka akan mendorong negara tersebut untuk berperilaku *compliance*. Namun, negara peserta juga dapat menunjukkan sikap *noncompliance* karena tidak selamanya negara tersebut dapat mematuhi keseluruhan isi dari perjanjian yang telah disepakatinya. Menurut Chayes & Chayes (1993), terdapat beberapa faktor yang mendorong negara peserta untuk bersikap cenderung tidak patuh yaitu ambiguitas, kapabilitas dan pengaruh dimensi temporal. Suatu perjanjian internasional kerap kali menggunakan bahasa yang sulit dimengerti dengan cakupan pembahasan yang terlalu luas dan umum. Perjanjian internasional juga tidak membahas secara mendalam mengenai hal-hal yang boleh dilakukan atau dilarang bagi para negara peserta. Keambiguitasan yang dimiliki oleh CEDAW akan memengaruhi interpretasi dari masing-masing negara peserta. Sementara itu, negara bersama dengan aktor non-negara harus memiliki pandangan yang sama untuk dapat memenuhi komitmennya dalam mengimplementasikan suatu perjanjian internasional menjadi hukum, kebijakan maupun perundangan. Negara peserta diharuskan untuk dapat memengaruhi perilaku semua entitas yang ada di dalamnya. Hal ini akan menunjukkan kapabilitas yang dimiliki oleh negara peserta tersebut. Dimensi temporal berkaitan dengan terjadinya perubahan sosial dan ekonomi ketika negara peserta sedang dalam proses mengadopsi suatu perjanjian internasional. Negara peserta terkadang merasa dilema karena terdapat permasalahan domestik lainnya yang memaksanya untuk membuat prioritas utama. Keadaan tersebut mengakibatkan negara peserta terbentur dengan komitmennya terhadap suatu perjanjian internasional yang telah disepakati (Chayes & Chayes, 1998).

PEMBAHASAN

Praktik *dowry* di India diperkirakan telah berlangsung sejak abad ke-13 Masehi. Pemberian *dowry* oleh pihak pengantin perempuan kepada pihak pengantin laki-laki awalnya hanya dilakukan oleh masyarakat berkasta Brahmana yang berada di wilayah India bagian utara dan barat laut (Dalmia & Lawrence, 2005). Praktik *dowry* terus berkembang seiring dengan kedatangan bangsa asing ke India. Kolonial Inggris ketika dipimpin oleh Lord Cornwallis memberlakukan sistem zamindari yang mengubah praktik *dowry* secara keseluruhan. Perempuan India pada saat itu dilarang untuk memiliki segala jenis properti sehingga menyebabkan pihak pengantin laki-laki dapat dengan mudah menguasai *dowry* yang diberikan oleh orang tua pengantin perempuan (Mohamad, 2013). *Dowry* kemudian dianggap sebagai hak bagi pengantin laki-laki ketika akan menikah dengan pengantin perempuan dan juga mulai dilakukan oleh masyarakat non-Hindu dan dalit. Pihak pengantin perempuan yang tidak lagi mampu memenuhi permintaan *dowry* mengakibatkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pihak pengantin laki-laki terhadap pengantin perempuan. Kekerasan terhadap perempuan akibat *dowry* tersebut apabila menimbulkan kematian, maka akan disebut dengan istilah *dowry death*.

India telah berupaya dalam menangani permasalahan *dowry death* yaitu melalui *Hindu Succession Amendment Act (2005)*, *Protection of Women from Domestic Violence Act (2005)* dan *The Ministry of Women and Child Development* yang mana telah disesuaikan dengan berdasarkan prinsip-prinsip CEDAW. *Hindu Succession Amendment Act (2005)* merupakan hasil amandemen dari *Hindu Succession Act (1956)* yang bertujuan untuk mengubah perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dalam hal kepemilikan properti (Kharat, 2017). *Protection of Women from Domestic Violence Act (2005)* atau PWDVA 2005 memiliki cakupan yang lebih luas dalam mendefinisikan kriteria kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. PWDVA 2005 tersebut memiliki tujuan utama yaitu untuk melindungi pengantin perempuan dari adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang berasal dari pihak pengantin laki-laki (Ministry of Law and Justice, 2005). *The Ministry of Women and Child Development* merupakan kementerian yang bertujuan memberdayakan para perempuan di India agar terbebas dari perlakuan diskriminatif, menyadarkan akan hak-hak yang dimilikinya dan memberdayakan secara sosial dan ekonomi. *The Ministry of Women and Child Development* memiliki program yang mendukung tujuan utamanya tersebut yaitu *Swadhar Greh Scheme* (Ministry of Women and Child Development, 2017).

Bahasa perjanjian yang cakupannya terlalu luas akan mendorong negara peserta untuk menganggap bahwa tidak ada kewajiban spesifik yang perlu diterapkannya secara menyeluruh (Schane, 2002). India melalui deklarasi pertamanya terhadap CEDAW mengindikasikan bahwa tidak akan melakukan campur tangan terhadap hal-hal yang dianggap bersifat pribadi yang berkaitan dengan kelompok masyarakat manapun yang ada di negaranya terkait dengan pelaksanaan budaya tradisional setempat. Hal-hal yang bersifat pribadi menurut *The Constitution of India* yaitu permasalahan pernikahan, perceraian, pembagian hak waris dan proses pengadopsian. Permasalahan terkait dengan hal-hal pribadi tersebut akan diselesaikan oleh tokoh adat menggunakan dasar *personal law* seperti *Hindu Succession Amendment Act (2005)*. India melalui pernyataan deklarasi tersebut telah menunjukkan sikap untuk tidak melakukan kewajibannya dalam mengubah budaya tradisional yang diyakini oleh masyarakatnya melalui peraturan perundangan. Meskipun budaya tradisional tersebut dianggap melakukan tindakan superioritas atau inferioritas terhadap salah satu gender yang mana tidak sesuai dengan pasal 5a dalam CEDAW. India juga tidak akan menjamin secara penuh persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di dalam lingkup rumah tangga seperti yang terdapat di pasal 16 ayat 1.

Keambiguitasan CEDAW ini dimanfaatkan oleh India untuk hanya melakukan pengimplementasian CEDAW melalui hukum, kebijakan dan peraturan perundangan yang sifatnya hanya preventif seperti PWDVA 2005 dan *Swadhar Greh Scheme*. Mayoritas aktivis dan pengamat hukum di India padahal telah mendesak pemerintah untuk membuat peraturan perundangan baru terkait dengan penjatuhan pidana bagi pelaku *dowry death* (Manchandia, 2005). Selain itu, sebuah perjanjian internasional juga sering kali tidak memberikan jawaban atau solusi yang pasti atas permasalahan para negara peserta. India sejak meratifikasi CEDAW telah memiliki permasalahan mengenai kekerasan terhadap perempuan akibat *dowry*, yang mana dalam beberapa kasus menimbulkan kematian atau *dowry death*. Isu *dowry death* ini bahkan telah memanas di India sejak pertengahan tahun 1980-an (Walsh, 2011). Meskipun dalam laporan periodik India terhadap CEDAW telah disebutkan mengenai jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, *CEDAW Committee* tidak memberikan sanksi. Mereka hanya memberi teguran dan merancang program pemberdayaan perempuan untuk nantinya dilakukan oleh India bersama dengan UN Women (UNCT India, 2017). Hal ini menimbulkan kebingungan karena India sudah jelas melanggar beberapa pasal yang terdapat di CEDAW.

India selaku negara akan mempercayakan keberlangsungan hukum nasional tersebut kepada sub-negara yaitu kelompok masyarakat dan tokoh adat serta kepada aktor non-negara

yaitu lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pengajuan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan bantuan PWDVA 2005 dinilai cukup rumit. Hal ini dikarenakan setiap negara bagian hanya berkewajiban untuk memiliki seorang *protection officer* pada setiap distrik. Keterbatasan jumlah *protection officer* inilah yang menyebabkan banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tertunda setiap harinya. Pelapor paling cepat ditangani oleh seorang *protection officer* dalam waktu tiga bulan. *Protection officer* sering tidak ada di tempat padahal masih dalam jam kerja, sehingga pelapor kerap diminta untuk datang kembali lain waktu. Banyak dari mereka yang melakukan pekerjaan ini tidak secara penuh waktu melainkan paruh waktu. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari *protection officer* masih terikat kerja dengan lembaga pemerintah atau LSM lainnya. Tempat kerja yang diberikan juga jauh dari layak, ditambah dengan gaji yang diterima hampir setiap waktu mengalami penundaan atau tidak tepat waktu. Selain itu, tanggapan *protection officer* yang telah ditemui dianggap tidak terlalu memuaskan pelapor sehingga terkadang menimbulkan perkecokan.

Kebijakan terhadap *protection officer* pada setiap negara bagian berbeda-beda sehingga jumlah *protection officer* di setiap negara bagian tidak menentu. Negara bagian ada yang memiliki jumlah *protection officer* yang banyak sedangkan yang lain memiliki jumlah yang sangat sedikit. Persyaratan untuk merekrut *protection officer* juga tidak jelas. Beberapa ada yang menerima sarjana dari jurusan manapun sedangkan ada pula yang menerima hanya sarjana lulusan hukum atau bahkan menerima pekerja sosial berpengalaman. Mekanisme *protection officer* mulai dari perekrutan hingga masa kerja yang kurang jelas sampai mendapat perhatian oleh *high court*. *High court* bahkan menyarankan bahwa syarat perekrutan *protection officer* haruslah seseorang yang benar-benar memiliki pengalaman dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan selama kurang lebih tiga tahun. Seorang *protection officer* juga harus diperlakukan layaknya pegawai negeri sipil lainnya dengan disediakan infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Perempuan yang ingin melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya tidak harus berurusan dengan *protection officer*. Mereka dapat langsung melaporkannya melalui hakim atau pengacara. Namun, biaya menjadi kendala dalam menggunakan pengacara swasta yang ongkosnya sangatlah mahal sehingga banyak pelapor yang tetap mengandalkan jasa *protection officer* (Care India, 2016).

Keberadaan LSM diakui oleh PWDVA 2005 dengan sebutan *service providers* yang terdaftar dalam *Section 10* bagian *sub-section 1* (State Legal Services Authority, 2005). *Service Providers* berkewajiban dalam melindungi hak dan kepentingan para perempuan dengan menyediakan bantuan hukum, layanan medis dan beberapa layanan bantuan lainnya. Keberadaan dari *service providers* diakui cukup membantu pemerintah dalam upaya pengimplementasian PWDVA 2005 dengan terus aktif memperjuangkan hak-hak perempuan. LSM yang diakui sebagai *service provider* harus sudah terdaftar di *Societies Registration Act, 1860* atau *Companies Act, 1956* (Das, 2016). Meskipun demikian, *service providers* masih belum mengetahui secara pasti peran mereka dalam upaya pengimplementasian CEDAW melalui PWDVA 2005. Kurangnya komunikasi dengan pihak kepolisian *protection officer* dan pengadilan sering kali menimbulkan kesalahpahaman yang berujung dengan pelayanan yang tidak maksimal terhadap pelapor. Selain itu, banyak dari LSM yang meminta dana bantuan kepada negara bagian guna mendukung program layanannya tetapi sering kali tidak mendapat tambahan. Hal ini dikarenakan PWDVA 2005 tidak memberi kewajiban terhadap negara bagian untuk memiliki alokasi anggaran terhadap LSM yang terdaftar sebagai *service providers* (Lawyers Collective Women's Rights Initiative, 2010). Para LSM juga kurang memiliki tenaga kerja yang terampil karena hampir semua anggotanya tidak mendapat proses *training* maupun melalui proses seleksi. LSM sangat mengutamakan dukungan moral dan pemberian masukan mengenai langkah-langkah yang akan dipilih oleh pelapor.

Culture of silence telah menyebabkan masyarakat untuk tidak mengumbar permasalahan pernikahannya karena dianggap sebagai hal yang bersifat pribadi. Tindakan

melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga hanya akan dianggap aib yang memperlakukan keluarga kedua belah pihak (The Wire, 2017). Banyak perempuan di India yang memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan sehingga masih banyak dari mereka yang tidak melaporkan tindakan kekerasan yang menyimpannya kepada pihak yang berwajib. Hal ini justru tidak mengakibatkan pelaku kekerasan jera, mereka akan kembali melakukan perbuatannya sehingga dapat menimbulkan kematian terhadap perempuan. *Culture of silence* yang berkembang di India juga telah mendorong perempuan untuk tidak mengumbar masalah rumah tangga yang dianggap sebagai hal pribadi. Mereka lebih memilih untuk menerima kekerasan yang dialaminya ketimbang membiarkan orang lain untuk ikut campur. Perceraian merupakan hal yang sangat memalukan dalam sistem sosial di India (Stein, 1988). Pengantin perempuan diharuskan untuk menghormati seluruh anggota keluarga suaminya. Sikap penghormatan yang demikian dimanfaatkan oleh mertua dan kerabat untuk berlaku sewenang-wenang dalam menuntut *dowry* terhadap pengantin perempuan dan keluarganya (Banarjee, 2013). Masyarakat India terkadang memilih untuk menyelesaikan permasalahan terkait *dowry* dengan menggunakan *personal law* ketimbang hukum nasional. India menggunakan kurangnya inisiatif dan persetujuan masyarakat sebagai pembenaran atas kegagalannya dalam mengambil langkah-langkah yang lebih agresif untuk mengurangi *dowry death*.

Sementara itu, penerapan *Hindu Succession Amendment Act (2005)* juga mengalami kendala karena pendapat dari kalangan tokoh adat yang sering berbeda. Hal inilah yang membuat suatu kasus mengalami penundaan dalam batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Kebanyakan dari masyarakat maupun tokoh adat juga masih menggunakan *Hindu Succession Act (1956)* sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu kasus. Para tokoh adat bahkan kerap kali menyerahkan kasus-kasus yang seharusnya diselesaikan dalam *personal law* ke *High Court* yang berada di negara bagian (Rautenbach, 2006).

Swadhar Greh Scheme yang berada di bawah pengawasan *The Ministry of Women and Child Development* juga mengalami beberapa kendala, diantaranya yaitu masih membatasi jumlah perempuan yang dapat tinggal di *shelter* yaitu maksimum 30 orang per distrik. Belasan perempuan India padahal mengalami kekerasan dalam rumah tangga hampir setiap harinya (Amnesty International, 2018). Selain itu, program ini belum dapat menjangkau hingga ke pelosok desa di India. Pemberian dana terhadap *Swadhar Greh Scheme* oleh pemerintah pusat cenderung tidak stabil dan mengalami penurunan. Pemerintah pusat dilaporkan hanya memberi dana sejumlah Rs 755.43 lakh pada tahun 2018. Anggaran tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang berkisar Rs 5,717.1 lakh. Menurut laporan Hindustan Times, terdapat sebanyak 26 dari 599 *shelter* yang berada di West Bengal, Odisha and Uttar Pradesh dianggap tidak layak huni dan tidak menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh para perempuan yang tinggal di sana (Hindustan Times, 2018).

Keterlibatan perempuan dalam *local decision making* meningkat di India. Sebanyak dua pertiga perempuan akan dilibatkan untuk aktif dalam proses pengambilan keputusan pada berbagai lembaga pemerintah, baik itu di tingkat desa maupun kota (Asian Development Bank, 2013). Hipergami diartikan sebagai pernikahan antar kasta yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di India untuk menaikkan status sosial pengantin perempuan. Konsep hipergami dalam konteks sejarah sudah tertulis dalam manuskrip Hindu kuno yang bernama *Smriti*. Sistem *dowry* berkembang beriringan dengan hipergami karena berkaitan dengan kasta di India. Hipergami banyak ditemukan di bagian pedesaan India yang digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan modernisasi. Pernikahan antar kasta tersebut mendapat banyak dukungan oleh para tokoh terkenal di India. Selain itu, India belum dapat sepenuhnya melakukan perubahan dalam bidang ekonomi karena masih berketat pada kemiskinan. Penduduk India yang mengalami kemiskinan dilaporkan sebanyak 364 juta dari 1,325 miliar pada tahun 2016 (The Indian Express, 2019). Kemiskinan yang terjadi salah satunya diakibatkan oleh permintaan *dowry*

yang terlalu tinggi atau melebihi kemampuan pihak pengantin perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat konsumerisme yang dilakukan oleh masyarakat India (Driel, 2007). Pihak pengantin laki-laki dalam pelaksanaan *dowry* sering kali meminta berbagai macam *dowry* seperti komoditas ternak, lahan, logam mulia serta pakaian, perabotan dan kendaraan mewah. Permintaan *dowry* yang sedemikian rupa merupakan salah satu bukti bahwa konsumerisme telah memengaruhi perkembangan sistem *dowry* di India (Kramarae, 2000). Sistem *dowry* dianggap mengakibatkan permasalahan ekonomi yang berkelanjutan, terutama bagi pihak pengantin perempuan yang menganggap bahwa praktik ini dapat menyebabkan kemiskinan di India. Upacara pernikahan digelar dengan sangat mewah, mulai dari pemilihan tempat, pakaian dan perhiasan yang digunakan. Hampir 60% permintaan emas digunakan untuk keperluan perhiasan pengantin perempuan di India. India memilih untuk bersikap tidak mematuhi CEDAW secara utuh karena memiliki permasalahan lain yang lebih penting daripada kasus *dowry death*, seperti korupsi dan terorisme.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan konsep *noncompliance*, dapat disimpulkan bahwa faktor yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap India untuk bersikap tidak patuh yaitu ambiguitas, kapabilitas dan dimensi temporal. Keambiguitasan CEDAW yang tidak menetapkan apa yang diperbolehkan dan dilarang bagi negara peserta telah mendorong negara peserta untuk menginterpretasikan CEDAW secara mandiri. India memanfaatkan celah ini hanya dengan membuat kebijakan yang sifatnya preventif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mayoritas dari aktivis dan pengamat hukum yang mendesak pemerintah dalam membuat peraturan perundangan baru terkait dengan penjatuhan pidana bagi pelaku *dowry death* di India. India yang terdiri dari pemerintah, LSM, dan masyarakat tidak mampu untuk mengadopsi maupun menerapkan hukum, kebijakan dan peraturan perundangan yang telah dibuatnya menurut prinsip-prinsip CEDAW. Mayoritas dari aktor tersebut lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga berdampak terhadap aktor lainnya. India juga telah berupaya dalam mendorong keikutsertaan perempuan dalam bidang sosial ternyata tidak cukup untuk mengubah budaya tradisional masyarakat setempat terkait sistem *dowry*. India juga terbukti bersikap tidak terlalu serius dalam menangani kasus *dowry death* dikarenakan memiliki prioritas lainnya yang dinilai lebih penting seperti menangani permasalahan korupsi dan terorisme. India telah menunjukkan sikap tidak patuh apabila menggunakan konsep *noncompliance*. Ketiga faktor dalam konsep ini mampu menjelaskan alasan India untuk bersikap demikian. Faktor tersebut yaitu ambiguitas, kapabilitas, dan dimensi temporal yang menyebabkan India tidak patuh terhadap CEDAW. Ketiga faktor tersebut memperkuat asumsi dasar dalam konsep *noncompliance* yang menyatakan bahwa ketidakpatuhan suatu negara dalam suatu perjanjian internasional disebabkan oleh keambiguitasan dari perjanjian yang diratifikasinya, kapabilitas yang dimiliki oleh negaranya dan dimensi temporal dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi.

REFERENSI

- Abraham Chayes, A. H. C., 1998. *The New Sovereignty: Compliance With International Regulatory Agreements*. 1st ed. Cambridge: Harvard University Press.
- Amnesty International, 2018. *Gender Based Violence*. [Online] Available at: <https://amnesty.org.in/projects/gender-based-violence/> [Accessed 1 June 2020].
- Asian Development Bank, 2013. *India: Gender Equality Diagnostic of Selected Sectors*. [Online] Available at: <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional->

- document/33970/files/india-gender-equality-diagnostic.pdf
[Accessed 10 June 2020].
- Banarjee, P. R., 2013. Dowry in 21st-Century India: The Sociocultural Face of Exploitation. *Trauma Violence Abuse* 15.1, 15(1), pp. 34-40.
- Bureau, National Crime Record, 2011. Crime in India Analysis. [Online] Available at: <http://ncrb.nic.in/StatPublications/CII/CII2013/Statistics2013.pdf> [Accessed 28 09 2019].
- Care India, 2016. An Analysis of Perceptions of Domestic Violence and Efficacy of the Implementation of the PWDV Act (2005) in Bihar. 1st ed. Bihar: Care India.
- Collection, U. N. T., 2019. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. [Online] Available at: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en [Accessed 01 09 2019].
- Das, P. K., 2016. Universal's Handbook on Protection of Women from Domestic Violence - Acts & Rules. 5th ed. Delhi: Universal Law Publishing.
- Driel, F. v., 2007. The Gender Question in Globalization: Changing Perspectives and Practices. 1st ed. Abingdon: Routledge.
- Hindustan Times, 2018. Decline in Centre's funds for key women-centric schemes in 2018. [Online] Available at: <https://www.hindustantimes.com/india-news/decline-in-centre-s-funds-for-key-women-centric-schemes-in-2018/story-CjuD1WvRHhGbgrashymPyH.html> [Accessed 10 June 2020].
- Kharat, S. P., 2017. EFFECT OF THE HINDU SUCCESSION (AMENDMENT) ACT 2005 – JUDICIAL RESPONSE. Social Science Research Network.
- Kramarae, C., 2000. Global Women's Issues and Knowledge. In: D. Spender, ed. Routledge International Encyclopedia of Women. Abingdon: Routledge, pp. 100-129.
- Lawyers Collective Women's Rights Initiative, 2010. Staying Alive, s.l.: Lawyers Collective Women's Rights Initiative.
- Manchandia, P., 2005. Practical Steps towards Eliminating Dowry and Bride-Burning in India. *Tulane Journal of International and Comparative Law*, Volume 13, pp. 305-319.
- Ministry of Law and Justice of India, 2005. THE PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005. [Online] Available at: <http://legislative.gov.in/sites/default/files/A2005-43.pdf> [Accessed 2 June 2020].
- Ministry of Women and Child Development, 2017. About The Ministry. [Online] Available at: <https://wcd.nic.in/about-us/about-ministry> [Accessed 12 June 2020].
- Mohamad, M., 2013. Fitnah. [Online] Available at: <http://chedet.cc/?p=922> [Accessed 7 Desember 2019].
- Rajya Sabha Secretariat New Delhi, 2016. RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA). [Online] Available at: https://rajyasabha.nic.in/rsnew/rs_rule/rules_pro.pdf [Accessed 5 June 2020].
- Ranteallo, P. T. K. R. d. I. C., 2012. Dowry Murder: Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan di India. 1st ed. Bali: Universitas Udayana.
- Rautenbach, C., 2006. Phenomenon of personal laws in India: some lessons for South Africa. *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, 39(2), pp. 241-264.
- Reuters, 2018. The World's Most Dangerous Countries for Women. [Online] Available at: <https://poll2018.trust.org/> [Accessed 10 October 2019].

- Schane, S., 2002. Ambiguity and Misunderstanding in the Law. *Thomas Jefferson Law Review*, 26(1), pp. 3-4.
- Sonia Dalmia, Pareena G. Lawrence, 2005. The Institution of Dowry in India: Why It Continues to Prevail. *The Journal of Developing Areas*, 38(2), pp. 71-93.
- State Legal Services Authority, 2005. THE PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005 NO. 43 OF 2005. [Online] Available at: http://chdsla.gov.in/right_menu/act/pdf/domviolence.pdf [Accessed 5 June 2020].
- Stein, D., 1988. Burning Widows, Burning Brides: The Perils of Daughterhood in India. *Pacific Affairs*, 61(3), pp. 465-485.
- The Indian Express, 2019. India has highest number of poor despite 27 crore moving out of poverty in 10 years: report. [Online] Available at: <https://indianexpress.com/article/explained/india-poverty-minimum-income-5644342/> [Accessed 28 May 2020].
- The Wire, 2017. Culture of Silence Makes It Difficult for Women to Speak up Against Predatory Behaviour by Men. [Online] Available at: <https://thewire.in/gender/culture-silence-sexual-harrasment-pachauri> [Accessed 3 June 2020].
- UNCT India, 2017. JOINT SUBMISSION OF INDIA UN COUNTRY TEAM (UNCT) FOR THE UNIVERSAL PERIODIC REVIEW OF INDIA, 3RD CYCLE, Bangkok: United Nations Human Rights Council.
- Walsh, J. E., 2011. *A Brief History of India*. 2nd ed. New York: Facts on File, Inc..
- UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, 1992. CEDAW General Recommendation No. 19: Violence against women. [Online] Available at: <https://www.refworld.org/docid/52d920c54.html> [Accessed 8 June 2020].
- Women, UN, 2014. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. [Online] Available at: <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf> [Accessed 28 09 2019].